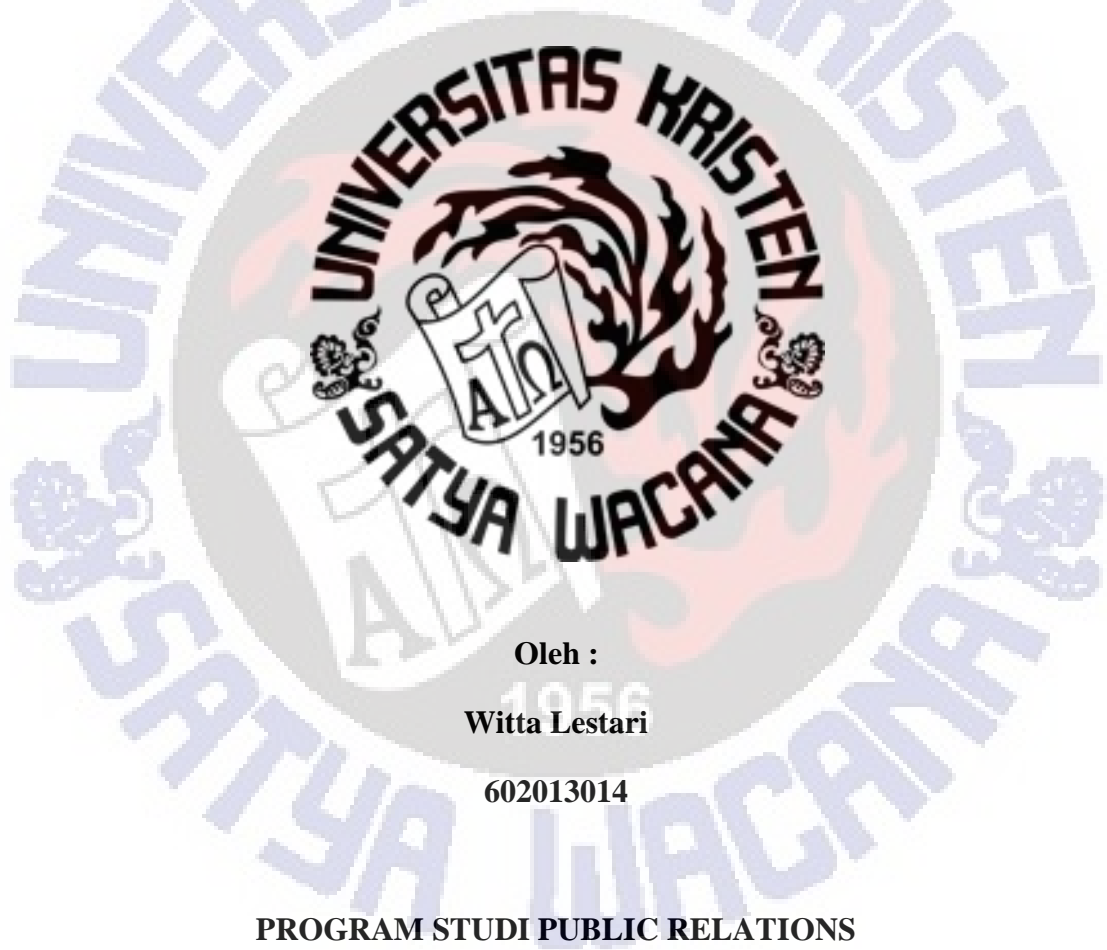


**UPAYA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM PENATAAN DAN
PENGELOLAAN PKL MELALUI PEMBENTUKAN POLA KOMUNIKASI DENGAN
KELOMPOK PAGUYUBAN**

**Diajukan Kepada
Fakultas Teknologi Informasi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi**



**Oleh :
Witta Lestari
602013014**

**PROGRAM STUDI PUBLIC RELATIONS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

2017



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WITTA LESTARI
NIM : 602013014 Email : 602013014@student.uksw.edu
Fakultas : TEKNOLOGI INFORMASI Program Studi : PUBLIC RELATIONS
Judul tugas akhir : UPAYA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM PENATAAN DAN
PENGELOLAAN PKL MELALUI POLA KOMUNIKASI DENGAN KELOMPOK
PAGUYUBAN
Pembimbing : 1. DIAM NOVITA KRISTIANI, S.I.Kom., M.Si.
2. _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 4 September 2017


WITTA LESTARI
NIM 602013014
PUBLIC RELATIONS
Tanda tangan & nama sering mahasiswa



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WITTA LESTARI
NIM : 602013014 Email : 602013014@student.uksw.edu
Fakultas : TEKNOLOGI INFORMASI Program Studi : PUBLIC RELATIONS
Judul tugas akhir : UPAYA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM PENATAAN DAN
PENGELOLAAN PKL MELALUI POLA KOMUNIKASI DENGAN KELOMPOK
PAGUYUBAN

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas - Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beritanda pada kotak yang sesuai):

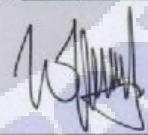
- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah kedalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah kedalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatasnya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas/dekan/kaprodi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 4 September 2017


Witta Lestari

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,


DIAN HOVITA KRISTİYANNI S.T.Kom., M.Si

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing 2

**UPAYA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM PENATAAN DAN
PENGELOLAAN PKL MELALUI POLA KOMUNIKASI DENGAN KELOMPOK
PAGUYUBAN**

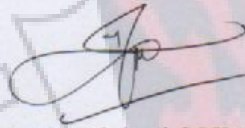
Oleh,

Witta Lestari
NIM : 602013014

ARTIKEL ILMIAH

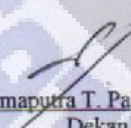
Diajukan Kepada Program Studi Public Relations guna memenuhi sebagian dari persyaratan
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi

Disetujui oleh,

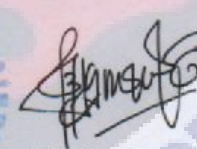


Dian Novita Kristiyani, S.I.Kom., M.Si.
Pembimbing 1

Diketahui oleh,



Dr. Dharmaputra T. Palekahelu, M.Pd.
Dekan



George Nicholas Huwae, S.Pd., M.I.Kom.
Ketua Program Studi S1 Public Relations

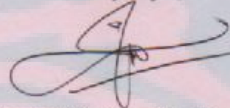
**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2017**

Lembar Pengesahan

Judul Tugas Akhir : Upaya Pemerintah Kota Salatiga Dalam Penataan Dan Pengelolaan PKL Melalui Pola Komunikasi Dengan Kelompok Paguyuban

Nama Mahasiswa : Witta Lestari
NIM : 602013014
Program Studi : S1 Public Relations
Fakultas : Teknologi Informasi

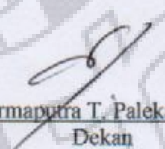
Menyetujui,



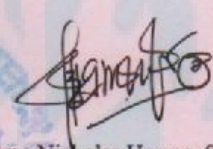
Dian Novita Kristiyani, S.I.Kom., M.Si.

Pembimbing 1

Mengesahkan,



Dr. Dharmaputra T. Palekahelu, M.Pd.
Dekan

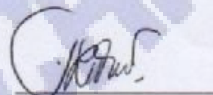


George Nicholas Huwae, S.Pd., M.I.Kom.
Ketua Program Studi S1 Public Relations

Dinyatakan Lulus tanggal: 15 Agustus 2017

Reviewer :

- Dr. Rini Darmastuti, S.Sos., M.Si.





FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jalan Diponegoro 52 – 60
Phone. (0298) 321212 (Hunting)
Fax. (0298) 321433
E-mail: fti@uksw.edu
Salatiga 50711 – INDONESIA



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLISH JURNAL

Dengan mempertimbangkan isi dari jurnal mahasiswa :

Nama Mahasiswa : WITTA LESTARI

NIM : 602013014

Maka jurnal ini dinyatakan :

LAYAK TERBIT / ~~TIDAK LAYAK TERBIT~~

Menyetujui,

RIAN NEOVITA KAPISDIYANI

Pembimbing 1



Pembimbing 2

Mengetahui,

Dr. Rini Darmastuti, M. S.

Reviewer

UPAYA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN PKL MELALUI POLA KOMUNIKASI DENGAN KELOMPOK PAGUYUBAN

Witta Lestari dan Dian Novita Kristiyani, S.I.Kom., M.Si.

Program Studi Public Relations, Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro No.52-60

Salatiga, Jawa Tengah, No Telp. (0298) 321212

Email : 602013014@student.uksw.edu

diannovita2087@gmail.com

Abstract

The city government of Salatiga has a role and contribution which is big enough in ruling the street markets. Unfortunately, Salatiga lacks of land and place which becomes a problem for government to deal with street markets. One way that being applied by government is they put into an operational duration toward street markets, which are most of them located in Pasar Raya 1. In order to organize and manage the street markets, the government asks the related officials to involve and cooperate in every planning and implementing the programs. Besides, there is also forming the communication pattern between official government through Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar (UPTD) organization and street markets association group. The purpose of this research is to explain about government's effort on organizing and managing the street markets, and also to explain about communication pattern between official government and street markets association group. This research is using qualitative method in order to explore and observe a social phenomena which involving government on organizing and managing street markets in Salatiga. Data of this research were being collected through deeply interview with official government in Salatiga, that being responsible to organize, rule, and manage the street markets. In fact, government, through.

Keywords : Communication Management, Communication Pattern, Public Policy.

Abstrak

Pemerintah kota Salatiga memiliki peran dan andil yang cukup besar dalam upaya mengatur keberadaan pedagang kaki lima. Keterbatasan lahan di kota Salatiga menjadi suatu kendala bagi pemerintah untuk melakukan upaya tersebut. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah yaitu dengan memberlakukan sistem jam operasional bagi pedagang kaki lima, yang sebagian besar berada di wilayah Pasar Raya I. Untuk melaksanakan upaya penataan dan pengelolaan tersebut, pemerintah kota Salatiga turut melibatkan dinas-dinas terkait untuk bekerjasama dalam setiap

perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu terdapat pembentukan pola komunikasi yang terjadi antara dinas pemerintahan melalui lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar (UPTD) dengan kelompok paguyuban pedagang kaki lima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya pemerintah kota Salatiga dalam penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima, dan menjelaskan pola komunikasi yang terjadi antara dinas pemerintahan dengan kelompok paguyuban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan mengamati suatu fenomena sosial yang melibatkan pemerintah dalam penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima di kota Salatiga. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dinas-dinas pemerintahan kota Salatiga, yang bertanggung jawab menata, mengatur dan mengelola pedagang kaki lima. Pada faktanya pemerintah melalui dinas-dinas terkait telah menjalankan program dengan baik dan terstruktur, namun upaya penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima belum merata dan masih dipusatkan di beberapa wilayah saja.

Kata Kunci : Manajemen Komunikasi, Pola Komunikasi, Kebijakan Publik.

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Masyarakat di Indonesia pasti sudah tidak asing dengan pedagang kaki lima yang keberadaannya hampir tersebar di setiap kota. Tak terkecuali di kota Salatiga yang notabene merupakan kota kecil dengan jumlah penduduk sebanyak 177.088 (*Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil-Badan Pusat Statistik Kota Salatiga Tahun 2011*), dimana sebagian besar warganya menggantungkan hidup pada sektor perdagangan. Mereka menempati 15 pasar diseluruh wilayah Salatiga. Kota Salatiga memiliki wilayah perdagangan yang berada di jalur lambat dan tersebar di sepanjang jalan Jendral Sudirman. Pada wilayah ini terdapat pusat perbelanjaan termasuk pasar tradisional yang terbagi menjadi dua, yaitu Pasar Raya I dan Pasar Raya II. Penulis memusatkan penelitian ini di kawasan Pasar Raya I dimana pemerintah kota Salatiga memberlakukan sistem jam operasional bagi pedagang kaki lima. Pasar Pagi beroperasi pada pukul 03.00- 07.00, lalu lokasi tersebut berganti menjadi lahan parkir pada pukul 07.30 hingga pukul 16.00 sore, kemudian PKL kuliner malam yang beroperasi pada 16.00-24.00 dinihari.

Keberadaan Pasar Pagi yang sudah beroperasi sejak Tahun 2002 tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat kota Salatiga. Pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin besar akhirnya mendorong pemerintah untuk memberlakukan Perda, yang mengatur dan menetapkan pengoperasian Pasar Pagi. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik Kota Salatiga yang bersumber pada Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi & UMKM Kota Salatiga tahun 2015, tercatat sebanyak 712 pedagang yang menempati pasar pagi.

Lokasi	TDU	Non TDU	Jumlah
Pedagang Kaki Lima			
A. Yani (Kios Buah) dan	28	-	28
Jenderal Sudirman	58	-	58
Kemiri Raya	13	-	13
Kridanggo	19	-	19
Lapangan Pancasila	56	-	56
Muwardi	3	-	3
Pasar Pagi	712	-	712
Pasar Raya 1 Malam	41	4	45

Patimura	24	-	24
Margosari	1	-	1
Pos Tingkir	4	-	4
Shopping Gerobog Putih	111	-	111
Shopping Teras	49	-	49
Sukowati	6	-	6
Taman Pahlawan Buah	80	-	80
Turen	5	-	5
Blok C	70	-	70
Kemasan	14	-	14
<hr/>			
Jumlah	1.294	4	
Total			1.298

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Salatiga

Source : Board of Industrial, Trade, Cooperation, Micro, Middle Sized Business of Salatiga Municipality

<https://salatigakota.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/158>

Sikap pragmatis yang diambil untuk menguasai ruang publik untuk tujuan ekonomi, dengan cara mengabaikan hak-hak orang lain adalah sebuah persoalan yang jauh lebih serius, karena menyangkut hilangnya kearifan di ruang publik (Zudianto, 2008 : 69). Selain pedagang Pasar Pagi terdapat pula pedagang kaki lima yang menempati lokasi di area Pasar Raya I. Keberadaan PKL yang setiap tahunnya terus bertambah juga mendapat perhatian dari pemerintah kota Salatiga melalui pengelolaan dan penataan. Permasalahan tidak sebatas mengenai pertumbuhan PKL yang semakin besar, tetapi juga pada penempatan dan penataan yang tidak teratur. Faktanya masih banyak PKL yang tersebar di jalan Jendral Sudirman menggunakan fasilitas umum seperti trotoar jalan untuk berdagang.

Pemerintah membuat kebijakan umumnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Pengaturan mengenai bagaimana PKL harus beraktivitas di kota, demikian pula mengapa pemerintah kota melakukan perencanaan terhadap kotanya agar terlihat tertib, rapi, indah, dan nyaman bagi warganya, merupakan bagian dari kebijakan publik yang disusun dan akan diimplementasikan (Handoyo 2012 : 35-36). Beragam kebijakan serta peraturan daerah telah disusun oleh pemerintah kota Salatiga dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima. Pemerintah dalam membuat kebijakan telah disesuaikan dengan kondisi PKL di lapangan, sehingga keberadaannya tidak luput dari peraturan dan perizinan yang telah ditetapkan. Sebagai aparatur negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi serta

memberikan pengayoman kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para PKL yang turut memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Pengaturan terhadap pedagang kaki lima telah dilakukan oleh pemerintah kota Salatiga melalui jam operasional yang saat ini diterapkan di kawasan Pasar Raya I. Dengan adanya sistem jam operasional, pemerintah secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi para PKL supaya kegiatan ekonomi terus berjalan dengan baik. Diberlakukannya sistem jam operasional ini secara tidak langsung juga dapat menekan konflik, tanpa mengubah fungsi utama dari fasilitas umum. Pemerintah kota Salatiga melalui UPTD Pasar I juga melakukan pengelolaan dengan membentuk forum atau kelompok paguyuban PKL. Pembentukan paguyuban ini hanya dilakukan oleh pihak UPTD Pasar I, dan belum diterapkan di UPTD Pasar lainnya. Keberadaan kelompok paguyuban PKL diharapkan dapat menjadi wadah bagi para PKL agar terus berkembang serta mengoptimalkan komunikasi dengan pemerintah. Pembentukan kelompok paguyuban PKL juga cukup efektif untuk membantu program pemerintah dalam upaya pengelolaan PKL di kota Salatiga. Fakta ini telah menunjukkan bahwa pemerintah kota Salatiga telah melakukan upaya penataan dan pengelolaan terhadap pedagang kaki lima.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah kota Salatiga melalui dinas-dinas terkait dalam melakukan penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima. Penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai pola komunikasi yang terbangun, antara dinas UPTD Pasar I dengan kelompok paguyuban PKL. Kedua kelompok ini melakukan komunikasi dua arah hingga terbentuk relasi yang menghasilkan *feedback* positif dari kedua belah pihak.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen Komunikasi

Manajemen komunikasi merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien agar terjadi saling memengaruhi diantara keduanya. Pada prinsipnya, manajemen komunikasi adalah cara membangun dan mengelola suatu hubungan, baik secara lisan maupun tulisan agar tidak saling terjadi *missed communication* sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi dapat berjalan lancar dan damai (Abidin, 2015 :132). Pemerintah melalui dinas terkait menggunakan manajemen komunikasi dalam menangani penataan dan pengelolaan PKL. Hal ini dilakukan untuk menekan konflik maupun terbenturnya kepentingan dari masing-masing kelompok. Segala aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, Satpol pp, dan DISHUB perparkiran selaku dinas pemerintahan tidak luput dari perencanaan hingga manajemen komunikasi agar tercapai tujuan bersama.

Model Komunikasi

Model digambarkan sebagai cara untuk menunjukkan sebuah objek, dimana di dalamnya dijelaskan kompleksitas suatu proses, pemikiran, dan hubungan antara unsur-unsur yang mendukungnya. Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan atau mengkategorisasikan komponen-komponen yang relevan dari suatu proses. Komunikasi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam berkomunikasi, juga dapat digambarkan dalam

berbagai macam model. Model komunikasi dibuat untuk membantu dalam memberi pengertian tentang komunikasi, dan juga untuk menspesifikasi bentuk-bentuk komunikasi yang ada dalam hubungan antar manusia. Selain itu, model juga dapat membantu untuk memberi gambaran fungsi komunikasi dari segi alur kerja. (Cangara, 2015 :43-44)

Komunikasi yang terjalin antara dinas-dinas pemerintahan, dan pedagang kaki lima dengan dinas pemerintah merupakan suatu proses yang menunjukkan adanya suatu relasi yang menghasilkan timbal balik, hingga tercipta suatu hubungan yang saling menguntungkan. Dengan adanya komunikasi yang efektif, maka akan berpengaruh pada perilaku masing-masing kelompok, sehingga akan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik. Bentuk-bentuk komunikasi tercermin pada proses koordinasi antara dinas-dinas pemerintahan terkait hingga pembentukan pola komunikasi yang terbentuk dari lembaga pemerintahan dengan kelompok paguyuban pedagang kaki lima.

Dalam hal ini pemerintah memberikan wewenang kepada Dinas Perdagangan untuk mengatur dan menata pedagang kaki lima di kota Salatiga. Sehingga dalam prosesnya Dinas Perdagangan melakukan pengkoordinasian dengan lembaga pemerintahan atau dinas terkait berdasarkan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut tidak luput dari proses komunikasi dan dilakukan sesuai dengan alur kerja masing-masing lembaga pemerintahan, yang mengatur pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang berisikan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah. Analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya dan apa akibat atau konsekuensi dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan umumnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Handoyo 2012 : 35). Pada dasarnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memuat berbagai macam peraturan yang memiliki fungsi kompleks, yang didalamnya terdapat pengaturan terhadap pedagang kaki lima. Ada beberapa hal yang diutamakan oleh pemerintah, salah satunya adalah mengedepankan fungsi ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Namun di sisi lain pemerintah juga diharapkan dapat mengembangkan sektor informal dengan memperhatikan nasib para pedagang kaki lima yang memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah.

Perkembangan Kota

Regionalisasi wilayah adalah suatu pola perkembangan kota-kota (perkotaan) berdasarkan suatu jaringan pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan adanya suatu jalinan yang lebih erat antara kota-kota dengan wilayah yang dilayaninya, sehingga secara keseluruhan dapat diharapkan terciptanya suatu tata ruang/perkembangan spasial yang lebih efektif dan serasi. Jika kita kaji mengenai kehidupan dan perkembangan kota, maka akan kita temukan berbagai masalah antara lain : fungsi kota, penduduk kota, pemerintahan kota, dan fasilitas kota (Ridlo, 2016 : 222).

Berkembangnya kota Salatiga turut berimbas pada keterbatasan lahan yang semakin sempit, seiring dengan pembangunan yang dilakukan. Keadaan ini juga semakin menyulitkan pemerintah kota Salatiga dalam mengatur penempatan pedagang kaki lima yang tersebar di

berbagai wilayah. Keberadaan PKL liar juga ditengarai memicu permasalahan sosial. Keberadaan mereka menjadi salah satu masalah yang kini dihadapi oleh pemerintah kota Salatiga. Apabila tidak ada upaya penataan terhadap PKL liar yang semakin menjamur, maka akan sulit untuk menwujudkan tata kota yang teratur.

Perkembangan Kota dalam Sektor Ekonomi

Menurut S. Pamudji, pengertian Kota pada umumnya adalah sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu yang hidup dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu, berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistik. Rumusan ini pada dasarnya merupakan perpaduan dari berbagai pendekatan terhadap kota. Pendekatan Ekonomis memandang kota sebagai titik pertemuan lalu lintas ekonomi, tempat berpusatnya perdagangan, industri, dan kegiatan non-agraris lainnya, dimana peredaran uang sangat cepat dibandingkan dengan desa. (Pamudji, 1985 : 5). Berkembangnya kota turut mempengaruhi aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat yang mendiami kota tersebut. Pusat perdagangan yang berada di suatu kota turut memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam segi perekonomian. Hal ini terjadi di kota Salatiga dimana terdapat lokasi padat dagang yang berpusat di jalan Jendral Sudirman. Para warga yang mendiami wilayah tersebut turut berprofesi sebagai pedagang kaki lima dan pedagang pasar tradisional.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu (Satori, Komariah 2014 : 22-25). Penelitian kualitatif dalam topik ini tidak hanya dibahas berdasarkan pada keterangan narasumber saja, tetapi juga berdasar pada fakta di lapangan yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pemerintah dalam melakukan upaya penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima di kota Salatiga.

Penelitian deskriptif kualitatif menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah (*natural setting*). Peneliti terjun ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Ia bebas mengamati objeknya, menjelajah, dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang penelitian (Ardianto 2010 : 60). Penelitian deskriptif kualitatif digunakan penulis untuk mengeksplorasi dan mengamati fenomena sosial yang terjadi. Peneliti menemukan fakta-fakta menarik ketika terjun ke lapangan dan berinteraksi dengan PKL maupun lembaga pemerintah. Peneliti juga berkesempatan ikut serta dalam pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan yang diprakarsai oleh kelompok paguyuban PKL.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam (*Indeepth Interview*). Metode wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam, peneliti ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan (Satori, Komariah. 2014 : 129-130). Data penelitian dihasilkan melalui hasil wawancara dengan berbagai narasumber, yang berasal dari

dinas-dinas pemerintahan, seperti Kabid PKL Dinas Perdagangan, Kabag Penegakan Perda, Kasi Penegakan Perda, Ketua UPTD Pasar I, Ketua UPTD DISHUB Perparkiran dan Pengurus Paguyuban Setia Kawan. Data yang diperoleh akan diproses dan dianalisis dengan tahapan reduksi data, menganalisis data untuk mempertanggung jawabkan hasil yang telah diperoleh. Kemudian dengan penyajian data dengan mendefinisikan model sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan tertulis, dan menarik suatu kesimpulan dengan memutuskan makna, mencatat keteraturan, pola pola, penjelasan, alur sebab-akibatnya dan proposisi-proposisi.

Pembahasan

Peran Pemerintah kota Salatiga dalam menyusun dan menegakkan peraturan daerah tidaklah mudah. Berbagai macam kebijakan dan peraturan yang disusun untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama, nyatanya sering berjalan tidak sesuai dengan rencana. Hal tersebut terjadi di kota Salatiga dimana sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor perdagangan yang menempati pasar sebagai tempat mencari nafkah. Bersamaan dengan itu, lokasi-lokasi yang berada di sekitar pasar memiliki potensi bagi para pedagang lainnya dalam memanfaatkan lahan. Sayangnya lahan yang seharusnya diperuntukan sebagai fasilitas publik mulai beralih fungsi menjadi lapak-lapak pedagang kaki lima. Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai *Upaya Pemerintah Kota Salatiga dalam Penataan dan Pengelolaan PKL Serta Pembentukan Pola Komunikasi dengan Kelompok Paguyuban*. Penulis akan menjelaskan tentang peran dan koordinasi yang dilakukan oleh dinas pemerintahan terkait dalam melakukan penataan dan pengelolaan PKL. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan dan menata lokasi pedagang kaki lima, tanpa melupakan fungsi utama dari fasilitas umum. Kemudian penulis akan menjelaskan mengenai pola komunikasi yang terjadi antara lembaga pemerintahan dengan kelompok paguyuban.

Peran Dinas Pemerintahan dalam Penataan dan Pengelolaan PKL

Dinas Pemerintahan Kota Salatiga memiliki peran dan tanggung jawab dalam menata, mengatur dan mengelola pedagang kaki lima. Berdasarkan struktur yang sudah ada, berikut ini adalah gambaran mengenai peran dinas-dinas pemerintahan, yang penulis kembangkan menjadi skema peran pemerintah kota Salatiga, dalam upaya penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima.



Skema Peran Dinas Pemerintahan dalam Penataan dan Pengelolaan PKL

- **Peran Dinas Perdagangan Kota Salatiga**

Dinas Perdagangan merupakan lembaga pemerintahan kota Salatiga yang bertanggung jawab dalam mengelola pasar, dan dibentuk untuk melaksanakan sub urusan sarana distribusi perdagangan kota Salatiga. Sub bidang pengelolaan dibagi menjadi 3, yaitu bidang perdagangan, bidang pasar, dan bidang PKL. Lembaga ini turut berkontribusi dalam melakukan penataan dan pengelolaan, serta mengawasi kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang pasar dan PKL yang berada di kota Salatiga. Salah satu upaya yang ditempuh Dinas Perdagangan dalam menata pedagang kaki lima adalah dengan mengatur lokasi, yang diperuntukan bagi PKL di wilayah Pasar Pagi dan melakukan kegiatan sosialisasi.

Menurut teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi, perubahan kebijakan memerlukan dukungan koalisi yang luas dari berbagai kelompok ekonomi. Perubahan suatu kebijakan mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam masyarakat, perubahan tersebut bisa berwujud pergeseran perimbangan kekuatan diantara kelas-kelas sosial, atau pergeseran kepentingan berbagai kelompok di area penekan ekonomi (Malarangeng, Rizal, 2008 : 3). Pengaturan mengenai lokasi penempatan PKL telah tertuang pada Peraturan Daerah kota Salatiga. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan bertambahnya jumlah PKL liar, serta mengembangkan sektor ekonomi informal untuk kemajuan perekonomian masyarakat kota Salatiga. Kebijakan yang sebelumnya tertuang dalam perda Nomor 2 tahun 2003 yang mengatur PKL telah mengalami perubahan, karena dipandang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan.

Bapak Rorik selaku Kabid PKL mengemukakan bahwa saat ini, pengaturan PKL mengacu pada perda No. 4 tahun 2015 tentang penataan, pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Berdasarkan peraturan tersebut, telah ditunjukan lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang. Area Pasar Raya I merupakan salah satu lokasi yang merasakan dampak dari penataan PKL. Lokasi ini merupakan tempat bagi pedagang Pasar Pagi yang beroperasi sejak pukul 03.00-07.00 pagi. Para pedagang di lokasi ini beroperasi sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan, dan dihimbau untuk taat pada aturan yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan. Program penataan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan melalui kegiatan Sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017. Pada kegiatan sosialisasi juga disebutkan mengenai perpanjangan Surat Tanda Daftar Usaha (STDU), yang diperuntukan bagi para pedagang pasar maupun PKL. STDU ini berfungsi sebagai bukti daftar tempat usaha yang dapat digunakan apabila lokasi yang mereka tempati sewaktu-waktu mengalami relokasi.

- **Peran UPTD Pasar Raya I**

UPTD Pasar diberi wewenang oleh Dinas Perdagangan untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. UPTD Pasar memiliki tugas pokok pada bidang teknis pasar, yang mengakomodir segala bentuk kegiatan ekonomi di pasar tradisional dan area di sekitarnya. Lembaga ini bersifat teknis yang bertugas mengatur penataan pedagang, baik pedagang kaki lima maupun pedagang eksis. Pedagang eksis adalah seluruh pedagang yang menempati ruko dan lapak dagang diseluruh area pasar. Melalui lembaga inilah kegiatan perdagangan diatur dan dikelola untuk membantu Dinas Perdagangan.

Selain bersifat teknis, UPTD Pasar juga bertugas mengumpulkan dana retribusi yang dibebankan kepada para pedagang eksis maupun pedagang kaki lima. setiap harinya petugas UPTD pasar melakukan penarikan dana di wilayah Pasar Raya I yang disesuaikan dengan jam operasional pedagang. Karcis yang digunakan hanya digunakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi saja dan bukan sebagai tanda izin usaha. Informasi ini peneliti peroleh ketika berbincang dengan bapak Sugiyanto selaku bendahara pembantu UPTD I. Beliau menjelaskan bahwa dana retribusi akan dijumlah dan didata oleh petugas UPTD. Selanjutnya pemasukan dana retribusi akan dilaporkan ke Dinas Perdagangan. Sejumlah dana yang terkumpul kemudian disetorkan ke Bank Jateng. Hasil dari dana retribusi turut digunakan untuk pembangunan daerah dan juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pasar.

Bapak Sigit selaku Kepala UPTD I menjelaskan bahwa secara TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) UPTD Pasar wajib memberikan pengarahan kepada pedagang, untuk membentuk paguyuban atau kelompok pedagang sebagai suatu organisasi atau forum. Kelompok paguyuban dibentuk untuk mewadahi kegiatan pelaku pasar, sehingga para pedagang dapat saling mengemukakan pendapat, antara sesama pedagang, maupun pedagang dengan pemerintah. Pengelolaan PKL melalui pembentukan paguyuban saat ini hanya dilakukan oleh pihak UPTD Pasar I, dan belum dilakukan oleh dinas UPTD lainnya. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara dinas dengan pedagang kaki lima. Dampaknya baik pihak dinas maupun pedagang dapat saling bekerjasama untuk mensukseskan program pemerintah.

Pihak UPTD I bersamaan dengan PKL di area Pasar Raya I memiliki sebuah relasi yang cukup baik, penulis mendapat kesempatan untuk turut menyaksikan program yang diprakarsai oleh UPTD I dengan program “Bersih Pasar” yang dilaksanakan pada 20 Mei 2017. Perlu diketahui bahwa pedagang pasar pagi yang beroperasi dini hari hingga pagi memiliki masalah kebersihan. Masalah kebersihan ini sudah menjadi persoalan yang sulit diatasi karena kurangnya kesadaran pedagang pasar pagi yang tidak menjaga kebersihan. Pasalnya PKL malam sudah menjaga kebersihan dengan baik, hanya saja pedagang pasar pagi yang juga menempati lokasi yang sama tidak menjaga kebersihan sebagaimana mestinya. Segala macam limbah yang dihasilkan oleh pedagang pasar pagi tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan bau yang menyengat. Kebiasaan ini menimbulkan dampak buruk di lingkungan pasar dan lokasi PKL malam yang menjajakan kuliner.

Belum adanya upaya dari pemerintah berkaitan dengan masalah kebersihan dan buruknya sistem drainase di lokasi PKL Pasar Raya I, membuat pihak UPTD I berinisiatif untuk melakukan kegiatan bersih pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu PKL malam agar bau yang berasal dari saluran air dapat diminimalisir. Kegiatan ini diprakarsai oleh pihak UPTD I dan dibantu oleh Dinas Kebersihan kota Salatiga dan juga aparat TNI. Sosialisasi dilakukan seminggu sebelum kegiatan berlangsung, dengan cara lisan dan melalui media surat resmi yang ditujukan kepada pengurus paguyuban. Bapak Sigit juga mengemukakan bahwa dengan adanya kelompok organisasi pedagang, diharapkan proses sosialisasi berkaitan dengan program pemerintah dapat berjalan lebih mudah dan tepat sasaran.

- **Peran Dinas Satpol PP dalam Penegakan Perda**

Satpol pp merupakan bagian dari perangkat daerah yang memiliki tugas pokok untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Perda dan Perlindungan masyarakat.

Ketika ditemui suatu permasalahan di lapangan yang dianggap melanggar Perda, maka Satpol pp wajib menegakkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Bapak Celso Edgar selaku Kabid Penegakan, masalah yang sering terjadi di lapangan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PKL liar maupun PKL yang tidak tertib terhadap jam operasional.

PKL yang tersebar di area Pasar Raya I memiliki jam operasional masing-masing. Dengan diberlakukannya sistem tersebut, pemerintah berharap PKL dapat dengan sendirinya berlaku tertib. Peraturan mengenai jam operasional yang tidak ditaati akan berimbas pada terganggunya aktivitas pengguna jalan. Disinilah fungsi Satpol pp, mereka ditugaskan untuk ikut mengawasi aktivitas PKL yang menempati jalur lambat. Petugas Satpol pp akan bertindak apabila ditemui pedagang yang tidak tertib dalam mematuhi jam operasional berdagang. Tindakan yang dilakukan oleh Satpol pp masih sebatas memperingatkan, perlakuan kasar petugas hampir tidak pernah dilakukan, mereka mengutamakan cara persuasif ketimbang cara kekerasan yang hanya akan menimbulkan konflik. Pemandangan semacam ini mungkin tidak akan terjadi di kota-kota besar.

Dinas Perdagangan bersama dengan UPTD bertugas menyampaikan informasi kepada Satpol pp, apabila ada pelanggaran yang dilakukan PKL. Upaya penertiban akan ditindak lanjuti oleh Satpol pp yang berwenang melaksanakan penertiban. Lembaga-lembaga ini juga saling berkoordinasi apabila terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dinas pemerintahan kota Salatiga minimal satu kali dalam setahun. Melalui kegiatan semacam ini, pemerintah dan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk saling mengemukakan pendapat. Dalam upaya penegakan Perda, Satpol pp tidak dapat bertindak apabila tidak ada laporan terlebih dahulu, makadari itu Satpol pp juga mengatasi permasalahan yang sifatnya darurat.

Pihak Satpol pp juga tanggap terhadap hal-hal yang bersifat darurat, dan lebih mengarah kepada masalah sosial yang dilaporkan secara langsung oleh masyarakat. Laporan yang bersifat lisan akan dilakukan peninjauan terlebih dahulu, setelah itu akan ditindak dengan teguran. Apabila dari pihak masyarakat memberikan surat pemberitahuan yang dilengkapi dengan bukti foto/dokumentasi dalam bentuk apapun, maka Satpol pp akan menindak lanjutinya secara langsung. Proses tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerjasama dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ikut berkontribusi dalam menegakkan Perda.

- **Peran Dishub UPTD Parkir dalam Pengelolaan Sistem Parkir**

Pengelolaan lahan parkir di kota Salatiga diatur oleh Dinas Perhubungan bagian UPTD Perparkiran, sistem yang mereka jalankan mengacu pada perda Nomor 12 Tahun 2011 yang membagi 2 tempat parkir, yaitu parkir tepi jalan dan parkir khusus. Bapak Gusnur selaku Kepala UPTD Perparkiran menjelaskan bahwa, apabila dilihat dari peruntukannya, lahan yang disediakan untuk parkir masih berpotensi mengganggu arus lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan sumber daya manusia yang dapat mengatur dan menata lahan parkir. Petugas parkir memiliki tugas untuk menata dan mengelola lahan parkir. Selain bergerak di bidang jasa, juru parkir juga bertugas melakukan penarikan dana retribusi bagi pengguna kendaraan bermotor.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan (Sugianto. 2008 : 2). Dalam pelaksanaannya petugas parkir juga bertugas

mengawasi dan menjaga keamanan kendaraan yang terparkir, sesuai dengan lahan yang mereka kelola. Lokasi yang ditetapkan sebagai lahan-lahan parkir nyatanya belum sepenuhnya berfungsi maksimal, hal ini terbukti dengan adanya pedagang kaki lima yang menempati lahan parkir untuk berjualan.

Ruang publik secara konstitutif merupakan arena terbuka yang diperebutkan. Justru karena diperebutkan, ia dapat dibuat menjadi apa saja dan digiring ke arah mana saja (Priyono. 2010 : 377). Sesuai dengan fakta dilapangan, ruang publik seperti lahan-lahan parkir mulai diperuntukan menjadi lahan untuk berjualan oleh pedagang kaki lima, terlepas dari persoalan boleh atau tidaknya, sebagian besar PKL yang menempati lahan parkir menjual dagangan menggunakan mobil bak terbuka. Melalui aktivitas ini sudah pasti ruang publik tidak digunakan sebagaimana mestinya. Adanya lahan parkir sudah berpotensi mengganggu lalu lintas, maka berubahnya fungsi lahan parkir juga semakin mengganggu pengguna jalan lain. Hal ini semakin menguatkan kenyataan dilapangan bahwa sistem pengelolaan parkir di kota Salatiga tidak berjalan sesuai dengan mestinya.

Sistem pengelolaan parkir di kota Salatiga belum seluruhnya berjalan dengan baik, Dinas Perhubungan UPTD Perparkiran selaku penanggung jawab pengelolaan parkir, belum melakukan upaya untuk menindak lanjuti PKL yang menggunakan lahan parkir. Dinas Perdagangan yang seharusnya ikut mengatur PKL yang menggunakan kendaraan bermobil juga belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Hal ini terbukti dengan adanya penataan dan pengelolaan yang terorganisir seperti pengelolaan PKL di area Pasar Raya 1, tetapi dilain tempat masih ada PKL yang secara terang-terangan menggunakan lahan yang tidak semestinya dijadikan lapak berjualan.

Sejauh ini pedagang tidak mengalami masalah dengan pemerintah, hanya saja upaya penataan belum seluruhnya dilakukan dengan maksimal. Ada beberapa alasan yang membuat penulis berpendapat demikian. Alasan pertama yaitu, penataan dan pengelolaan PKL belum dilakukan secara merata oleh Dinas Perdagangan, hal ini terbukti dengan tidak seimbangny jumlah PKL di kota Salatiga dengan penyediaan lahan untuk mereka. Lahan yang diperuntukan bagi PKL masih terbatas dan hanya berpusat di Jalan Jendral Sudirman. Belum ada upaya untuk menekan pertambahan jumlah PKL di kota salatiga.

Kedua, sistem pengelolaan parkir belum berjalan dengan baik. Lahan parkir berfungsi ganda yang pada suatu waktu diperuntukan sebagai lahan parkir dan pada jam tertentu difungsikan menjadi lapak pedagang kaki lima. Pengaturan sistem ini sudah diterapkan di pasar raya I berdasarkan dengan jam operasional yang berlaku, tetapi hanya berpusat di Pasar Raya I saja dan ditempat lain pengaturanya tidak diatur, sehingga lahan parkir dan PKL berada pada tempat yang sama dan beroperasi dalam waktu yang sama. Kejadian ini dapat dilihat di area Pasar Raya II.

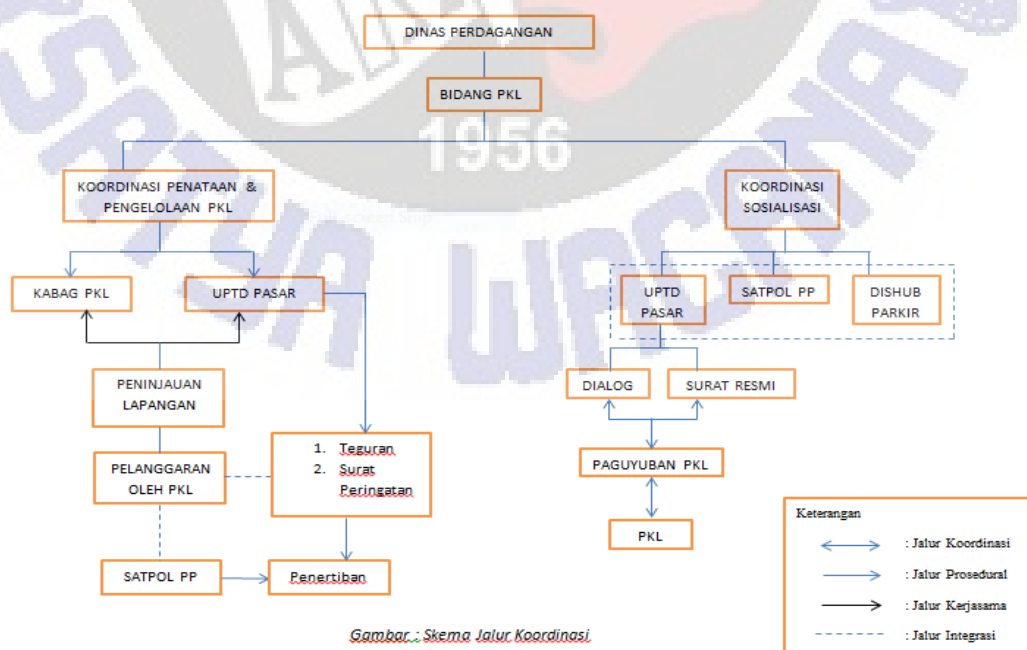
Ketiga, masih ada PKL yang menggunakan mobil bak terbuka menempati lahan parkir yang berbatasan langsung dengan trotoar, mobil yang digunakan tidak terparkir persis di lahan parkir melainkan menempati trotoar jalan. Pengaturan perparkiran yang diterapkan kepada PKL jenis ini juga tidak diatur oleh Dinas Perhubungan UPTD Parkir. Padahal jika mereka diberi pengarahan, pasti keberadannya bisa lebih tertata. Selain itu ada beberapa hal yang luput dari pengawasan dinas pemerintahan, yaitu mengenai biaya retribusi parkir yang diberlakukan kepada PKL bermobil. Jika dilihat dari biaya retribusi yang dibebankan kepada PKL bermobil, jelas

bahwa besarnya tarif parkir tidak ditentukan dari dinas perparkiran maupun dari petugas parkir. Seorang petugas parkir bernama Pak Bambang menjelaskan bahwa setiap harinya PKL memberikan biaya retribusi atas inisiatif sendiri.

Tujuan komunikasi antarpribadi adalah untuk melakukan kerja sama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak (Purwanto. 2006 : 23). Keberadaan PKL tidak hanya identik dengan statusnya sebagai pelanggar Perda, pada kenyataannya PKL turut memberikan sumbangsih kepada masyarakat disekitarnya. Pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha tidak hanya sebatas melakukan kegiatan ekonomi, namun juga membangun relasi dan komunikasi dengan konsumen, pemerintah, dan petugas parkir yang mengelola lahan parkir disekitar lapak mereka. Komunikasi yang dilakukan oleh PKL dan petugas parkir atau sebaliknya bersifat personal, dilakukan secara terus menerus dan keduanya saling berkoordinasi.

Koordinasi Penataan dan Pengelolaan PKL oleh Dinas Pemerintahan

Conyers dan Hill dalam Haryono, menyebutkan bahwa perencanaan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, yang menghasilkan keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan, tentang alternatif cara penggunaan sumber daya-sumber daya yang memungkinkan, dengan tujuan untuk mencapai suatu bagian dari tujuan dalam jangka waktu tertentu, di masa yang akan datang (Haryono, 2010 : 5). Pemerintah melakukan suatu perencanaan dalam proses penataan dan pengelolaan PKL di kota Salatiga. Perencanaan dibuat agar program yang disusun tepat sasaran. Tepat dalam memberlakukan peraturan dan menjalankan program yang diperuntukkan bagi PKL. Perda mengenai penataan dan pengelolaan PKL diharapkan mampu memberikan dampak positif dari segi ekonomi, sosial dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pemerintah melalui Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, Satpol PP dan DISHUB (UPTD Perparkiran) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menata dan mengelola PKL. Berikut adalah proses koordinasi dinas pemerintahan, yang penulis gambarkan berdasarkan pengamatan di lapangan.



Gambar. Skema Jalur Koordinasi

- **Proses Koordinasi Penataan dan Pengelolaan PKL**

Dinas Perdagangan melalui sub bidang PKL membagi dua jalur koordinasi, yaitu koordinasi penataan PKL dan koordinasi kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan merupakan suatu bentuk dari program penataan dan pengelolaan yang dicanangkan oleh pemerintah kota Salatiga. Kepala Bidang PKL akan bekerjasama dengan bagian UPTD Pasar untuk meninjau permasalahan yang ada di lapangan. Bila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, maka divisi ini akan menghubungi pihak Satpol pp untuk menindak para PKL yang melanggar aturan.

Saat ini masih banyak dijumpai PKL liar yang melanggar ketentuan, maka Dinas Perdagangan melalui UPTD akan berupaya dengan memberikan teguran. Apabila teguran yang diberikan tidak diindahkan oleh PKL, upaya selanjutnya adalah dengan memberikan surat peringatan. Jika melalui surat peringatan masih ada PKL yang melanggar, maka Dinas Perdagangan akan berkoordinasi dengan lembaga penegakan perda, yaitu Satpol pp untuk menindak para PKL. Tindakan penertiban merupakan usaha terakhir yang dilakukan, yaitu dengan membawa properti dagang seperti gerobak, meja, kursi dan peralatan dagang lainnya.

Conrad (dalam Tubbs dan Moss, 2005) mengidentifikasi fungsi komunikasi organisasi menjadi tiga, salah satunya adalah fungsi perintah. Fungsi perintah berkenaan dengan anggota-anggota organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan, dan bertindak atas suatu perintah. Tujuan dari fungsi perintah adalah koordinasi diantara sejumlah anggota yang bergantung dalam organisasi tersebut (Romli, 2014 :2). Dinas Satpol pp telah melaksanakan fungsi perintah sebagai lembaga yang berwenang menegakan Perda. Segala bentuk laporan yang berasal dari dinas pemerintahan akan diproses dan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan data yang penulis peroleh, pihak dinas-dinas terkait telah melakukan manajemen komunikasi dengan melakukan perencanaan, saling bertukar informasi, dan berkoordinasi, sehingga membuat mereka saling bekerjasama untuk melakukan penataan terhadap PKL. Komunikasi yang mereka jalankan telah berlangsung secara terus-menerus, sehingga membentuk suatu struktur koordinasi.

Kemudian proses koordinasi yang berkaitan dengan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun oleh setiap dinas pemerintahan kota Salatiga. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah berharap agar setiap program yang dicanangkan tepat sasaran, sehingga bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Dinas Perdagangan memiliki agenda rutin untuk melakukan sosialisasi dengan pedagang maupun PKL di kota Salatiga, sosialisasi dilakukan agar pedagang mengerti mengenai program-program pemerintah yang diperuntukan bagi kesejahteraan mereka. Kegiatan tersebut memerlukan dukungan dari dinas pemerintahan terkait, agar program yang berjalan sesuai dengan perencanaannya. Sebelum mengundang sejumlah pedagang, dinas terkait seperti Satpol pp, Dinas Perhubungan, dan UPTD dikumpulkan terlebih dahulu untuk melakukan rapat dan penyusunan materi sosialisasi. Setelah susunan kegiatan telah disepakati, pihak UPTD Pasar akan menyampaikan informasi menggunakan media surat resmi kepada kelompok paguyuban PKL. Selain menggunakan surat resmi, pihak UPTD juga dapat berdialog dengan pengurus paguyuban atau PKL secara langsung. Sosialisasi semacam ini bertujuan untuk membina hubungan yang baik dengan PKL di kota Salatiga, sehingga tidak timbul kesenjangan antara

pemerintah dengan para pedagang. Kegiatan sosialisasi merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Komunikasi dilakukan bertahap dengan melibatkan pihak-pihak yang mendukung proses komunikasi tersebut.

Pendekatan persuasif dilakukan oleh pemerintah agar pedagang yang sebelumnya tidak mengerti menjadi paham tentang program-program pemerintah, sehingga meminimalisir terjadinya konflik antara PKL dengan pemerintah kota Salatiga. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan berlangsung pada tanggal 23 Februari 2017 di kantor Dinas Perdagangan, yang dihadiri oleh perwakilan pedagang pasar pagi sejumlah 88 orang, pengurus paguyuban PKL, Lurah Kutowinangun Kidul, dan Lurah Kalicacing sebagai pengampu wilayah, Satpol pp, Dinas Perhubungan sebagai pengampu parkir, dan perwakilan dari Matahari Sinar Mas sebagai pihak swasta yang mengelola ruko dan perparkiran area pasar Raya 1.

Pembentukan Pola Komunikasi dengan Kelompok Paguyuban PKL

Pemerintah dipandang oleh masyarakat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dan menetapkan kebijakan, oleh sebab itu masyarakat harus paham tentang aturan yang harus ditaati, untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi seluruh elemen masyarakat. Peran pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sektor informal yang dijalankan oleh para PKL. Perencanaan telah dilakukan oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait agar para pedagang turut mendukung program penataan dan pengelolaan PKL, dengan begitu pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi para PKL untuk berkembang menjadi pelaku ekonomi mandiri.

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pedagang kaki lima diharapkan dapat berdampak pada aktivitas perdagangan, yang berjalan lancar tanpa adanya intervensi yang berlebihan dari pemerintah. Pemerintah melalui Dinas Perdagangan telah memfasilitasi PKL untuk membentuk kelompok pedagang atau kelompok paguyuban. Dengan adanya organisasi semacam ini, program-program pemerintah dapat tersalurkan dan berjalan sesuai perencanaan. Dijelaskan oleh Bapak Sigit selaku ketua UPTD I bahwa dalam tugas dan fungsinya, UPTD turut berperan sebagai lembaga yang ikut membentuk dan memfasilitasi kelompok paguyuban pedagang kaki lima.

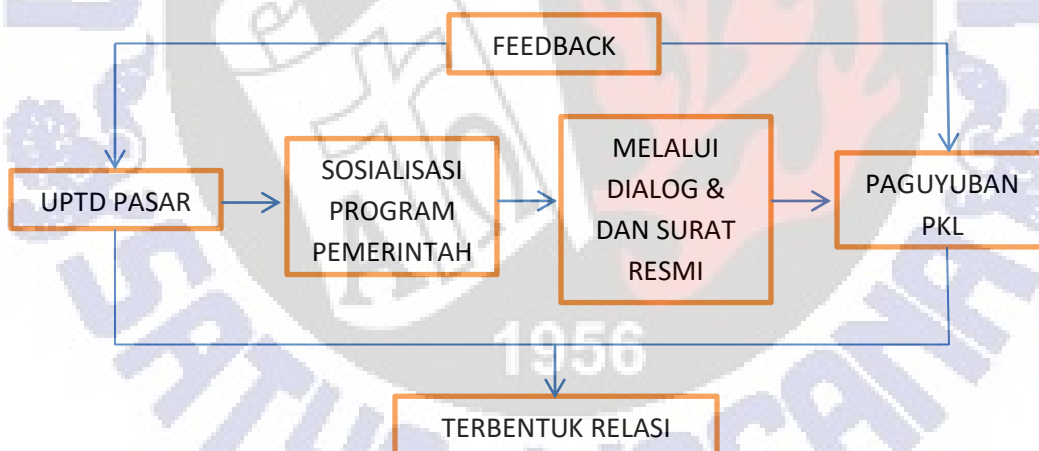
Kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang bersatu karena memiliki identitas yang sama, yang terikat karena mempunyai perasaan dan kepentingan yang sama sekaligus membedakan karakteristik mereka dengan orang-orang lain yang ada dalam masyarakat tempat mereka tinggal (Liliweri, 2014 : 19). Pada dasarnya organisasi kelompok paguyuban dibentuk untuk mewadahi para pelaku pasar termasuk para PKL, untuk saling mengemukakan aspirasi dan menjalin komunikasi. Masing-masing individu/pelaku pasar memiliki identitas yang sama sebagai pelaku usaha, memiliki tujuan bersama dalam mendirikan usaha, dan menuntut hak yang sama.

Keberadaan paguyuban PKL di kota Salatiga merupakan suatu bentuk persatuan pedagang kaki lima, yang juga memfasilitasi para pedagang untuk ikut dalam program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah kota Salatiga. Organisasi ini beranggotakan para pelaku pasar dan memiliki struktur organisasi. Setiap bulannya paguyuban PKL melaksanakan pertemuan rutin, yang digelar sebagai forum diskusi dan sarana penyampaian

informasi mengenai program pemerintah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak paguyuban akan diinformasikan dan dikoordinasikan dengan lembaga pemerintahan yang terkait.

Koordinasi yang dilakukan oleh pihak paguyuban PKL tidak hanya dilakukan dengan pihak Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar saja, tetapi juga dengan dinas-dinas terkait seperti Satpol PP. Paguyuban PKL yang memiliki wewenang untuk melindungi para PKL juga turut melakukan negosiasi dengan petugas Satpol PP apabila ada tindakan penertiban. Dari sinilah relasi antara kelompok paguyuban dengan dinas pemerintahan terbentuk, peran keduanya tidak hanya sebatas melakukan komunikasi tetapi juga saling mengedepankan sikap toleransi dan saling membangun relasi. Berdasarkan proses komunikasi yang telah dilakukan antara keduanya, terdapat suatu pola komunikasi yang terbentuk.

Terdapat suatu pembentukan pola komunikasi yang terjadi antara dinas pemerintahan, yaitu UPTD pasar dengan kelompok paguyuban. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, pihak UPTD juga turut serta dalam pembentukan dan pemberdayaan kelompok-kelompok paguyuban pedagang, agar setiap sosialisasi dan pelaksanaan program pemerintah dapat tercapai dengan mudah. Lembaga pemerintahan dan kelompok paguyuban melakukan komunikasi secara efektif dengan berdialog, hingga membentuk suatu relasi yang baik antara keduanya. Setiap proses komunikasi pasti akan menimbulkan *feedback* atau umpan balik yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan, dan berikut ini adalah gambaran pola komunikasi yang terbentuk antara pihak UPTD Pasar dengan kelompok paguyuban PKL.



Pola komunikasi tersebut menggambarkan tentang proses komunikasi yang terjalin antara pihak UPTD Pasar dengan paguyuban PKL. UPTD Pasar melakukan sosialisasi mengenai program pemerintah yang disampaikan melalui dialog dan menyampaikan pemberitahuan melalui surat resmi. Pemberitahuan ini disampaikan secara langsung kepada kelompok paguyuban oleh ketua UPTD Pasar. Komunikasi yang terjalin diantara keduanya menghasilkan *feedback* dengan terbentuknya relasi, hingga membentuk sikap PKL yang mematuhi peraturan yang disusun oleh Pemerintah. Relasi yang terjalin antara keduanya juga mempermudah tercapainya program pemerintah dalam rangka menata dan mengelola pedagang kaki lima di kota Salatiga. Timbal baliknya juga dirasakan langsung oleh pihak dinas dan pemerintahan terkait lainnya, dimana kelompok paguyuban selalu melibatkan dinas pemerintahan dalam setiap

kegiatan yang mereka selenggarakan. Melalui proses komunikasi tersebut, kedua kelompok ini saling membentuk suatu relasi yang dihasilkan dari proses mereka berkomunikasi.

Kesimpulan

Pemerintah memiliki andil yang cukup besar dalam upaya penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima di kota Salatiga. Berbagai macam program penataan dan pengelolaan PKL telah ditempuh oleh dinas-dinas pemerintahan, dengan tujuan agar keberadaan mereka tetap teratur tanpa melupakan fungsi dari fasilitas umum. Peraturan daerah yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah turut menjadi faktor penentu, berhasil atau tidaknya upaya pemerintah dalam mengatur pedagang kaki lima. Jika dilihat dari lokasi dan penempatannya, pedagang kaki lima yang berada di Salatiga belum seluruhnya merasakan dampak program penataan yang dilakukan oleh pemerintah.

Upaya pemerintah dalam melakukan penataan dan pengelolaan PKL selanjutnya adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diadakan 1 kali dalam setahun, oleh pihak Dinas Perdagangan dengan menyampaikan materi berkenaan dengan pembuatan dan perpanjangan Surat Tanda Daftar Usaha bagi PKL. Dalam kegiatan sosialisasi juga disampaikan mengenai pengaturan lokasi dagang di Pasar Pagi yang menempati area Pasar Raya I.

Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala pemerintah dalam melakukan upaya penataan pedagang kaki lima, maka dari itu salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah dengan memberlakukan sistem jam operasional berdagang. Namun satu hal yang perlu di garis bawahi, bahwa tidak semua lokasi pedagang kaki lima di kota Salatiga memberlakukan sistem jam operasional. Sistem ini hanya diberlakukan di kawasan Pasar raya I. Sementara di kawasan Pasar Raya II, lapak PKL dan lahan parkir berada pada satu tempat dan jam operasi yang sama. Hal ini membuktikan bahwa upaya penataan dan pengelolaan PKL di kota Salatiga belum dilakukan secara menyeluruh.

Berikutnya mengenai penempatan PKL yang menggunakan mobil di lahan parkir yang belum diatur dengan baik, apabila keadaan tersebut terus dibiarkan maka akan sulit untuk mewujudkan kota Salatiga yang tertib. Yang terakhir adalah terbentuknya pola komunikasi antara lembaga pemerintahan dengan kelompok paguyuban PKL. Pola komunikasi yang dilakukan telah membentuk perilaku PKL yang cenderung mematuhi peraturan serta aktif berinteraksi dengan pihak dinas. Demikian pula dengan UPTD Pasar yang selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak paguyuban PKL. Secara keseluruhan relasi yang mereka ciptakan merupakan suatu bentuk keberhasilan pemerintah dalam upaya pengelolaan pedagang kaki lima.

Saran

Dari kesimpulan tersebut terdapat beberapa hal yang belum dicapai oleh dinas-dinas pemerintahan, sebagai lembaga yang berwenang dalam melayani, berupaya, dan berperan dalam proses-proses tersebut. Berikut merupakan saran bagi dinas-dinas pemerintahan kota Salatiga dan kelompok paguyuban pedagang kaki lima.

1. Sebaiknya dinas-dinas terkait menyusun program penataan PKL meliputi wilayah yang lebih luas, dan tidak hanya berfokus pada satu lokasi saja, yaitu di area Pasar Raya I.

Akan lebih baik apabila penataan dilakukan dengan pendekatan yang lebih intensif kepada seluruh PKL di sepanjang Jalan Jendral Sudirman, agar pemandangan pusat kota Salatiga lebih tertata.

2. Dengan adanya keterbatasan lahan pemerintah diharapkan dapat mencari solusi, dengan memaksimalkan lahan yang berada di Pasar Raya 1 untuk mendirikan suatu kawasan khusus PKL, yang dikelola oleh kelompok pedagang dan juga pemerintah. Lokasi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata kuliner, yang dapat menjadi alternatif wisatawan ketika berkunjung ke kota Salatiga.
3. Dinas-dinas pemerintahan seperti Dinas Perdagangan sebaiknya melakukan sosialisasi minimal 3 kali dalam setahun. Bila kegiatan sosialisasi hanya dilakukan 1 kali saja dalam setahun, maka akan berdampak pada kurang efektifnya upaya dinas-dinas pemerintahan dalam menyampaikan informasi, berkenaan dengan program-program pemerintah.
4. Keberadaan PKL yang menggunakan mobil seharusnya dapat diatur dengan memberikan penyuluhan, dalam bentuk sosialisasi khusus. Sehingga lahan parkir yang ditempati dapat digunakan sebagaimana mestinya. Seharusnya dinas-dinas terkait dapat melakukan pengaturan dan peninjauan kembali. Tetapi pada kenyataannya hal ini belum ditindak lanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka :

- Abidin, Yusuf Zainal. 2015. *Manajemen Komunikasi – Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung : Pustaka Setia
- Ardianto, Elvinaro. 2010. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Cangara, Hafied. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Handoyo, Eko. 2012. *Eksistensi Pedagang Kaki Lima – Studi Tentang Kontribusi Modal Sosial Terhadap Resistensi PKL di Semarang*. Salatiga : Tisara Grafika
- Haryono, Paulus. 2010. *Perencanaan Penggunaan Kota dan Perubahan Paradigma*. Jogjakarta : Pustaka Belajar
- Liliweri, Alo. 2014. *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Malarangeng, Rizal. 2008. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi : Indonesia 1986-1992*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
- Pamudji, S. 1985. *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*. Jakarta : PT Bina Aksara
- Priyono, SJ Herry. 2010. *Menyelamatkan Ruang Publik* dalam buku *Ruang Publik-Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis Sampai Cyberspace*. Jogjakarta : Kanisius (Anggota IKAPI)
- Purwanto, Djoko. 2006. *Komunikasi Bisnis – Edisi ketiga*. Jakarta : Erlangga
- Ridlo, Muhammad Agung. 2016. *Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan*. Yogyakarta : Deepublish
- Romli, Khomsahrial. 2014. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta : PT Grasindo
- Satori, Jam'an. & Komariah, Aan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : Grasindo
- Zudianto, Heri. 2008. *Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik - Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur*. Jogjakarta : KANISIUS (Anggota IKAPI)

Peraturan Daerah Kota Salatiga. http://jdih.salatigakota.go.id/Berkas/perda_2015_04.pdf,
Sabtu, 25 Maret, 2017, 9:12:47

BPS Kota Salatiga. *Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga*
<https://salatigakota.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/158> Rabu, 5
April, 2017, 0:39:18

